

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022,2023 DAN 2024

Grace Victress Gabriel Belen¹ Ria Ekanindya Widyaningsih²

¹Mahasiswa Fakultas Akuntansi Keuangan Publik, FEB Universitas Terbuka

²Dosen Fakultas Akuntansi Keuangan Publik, FEB Universitas Terbuka

031251611@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio efisiensi dan efektivitas berdasarkan data laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan mengalami fluktuasi: pada tahun 2022 tergolong sangat tidak efisien (107,66%), tahun 2023 cukup efisien (83,88%), dan tahun 2024 kurang efisien (98,46%). Sementara itu, tingkat efektivitas menunjukkan kinerja yang positif, yaitu sangat efektif pada tahun 2022 (101,18%) dan 2024 (104,77%), serta cukup efektif pada tahun 2023 (81,07%). Temuan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah dari sisi efisiensi serta stabilitas dalam pencapaian target pendapatan daerah. Hasil ini sesuai dengan teori efisiensi menurut Mahmudi (2016), yang menekankan optimalisasi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, serta teori efektivitas menurut Mardiasmo (2009), yang menilai keberhasilan pencapaian target. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo dinilai semakin baik dan mendekati prinsip good governance dalam bidang keuangan publik.

Kata Kunci : Efisiensi, Efektivitas, Keuangan Daerah

Abstract

This study aims to analyze the efficiency and effectiveness of financial management in the Sidoarjo Regency Government during the fiscal years 2022, 2023, and 2024. A descriptive quantitative approach was employed by calculating efficiency and effectiveness ratios based on budget realization reports. The results show that the level of financial efficiency fluctuated: it was classified as highly inefficient in 2022 (107.66%), fairly efficient in 2023 (83.88%), and less efficient in 2024 (98.46%). Meanwhile, the level of effectiveness showed positive performance, with very effective outcomes in 2022 (101.18%) and 2024 (104.77%), and moderately effective results in 2023 (81.07%). These findings indicate improvements in financial governance in terms of efficiency and stability in achieving regional revenue targets. The results are in line with the theory of efficiency by Mahmudi (2016), which emphasizes the optimal use of resources to produce maximum output, and the theory of effectiveness by Mardiasmo (2009), which highlights the achievement of planned objectives. Therefore, the financial management of Sidoarjo Regency is considered to be improving and increasingly aligned with the principles of good governance in public financial management.

Keywords: Efficiency, Effectiveness, Regional Finance

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan secara

efisien, efektif, akuntabel dan transparan, agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Anwar (2019) manajemen keuangan merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Untuk konteks pemerintah daerah, pengelolaan keuangan bukan hanya tentang mempertahankan opini audit yang baik, tetapi juga mengenai bagaimana anggaran dimanfaatkan secara optimal dan berorientasi pada hasil, hal ini dapat dilihat dari tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan laporan keuangan menjadi indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang menjadi penyangga utama Provinsi Jawa Timur mempunyai tanggung jawab besar dalam mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dan 2023, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, opini WTP tidak secara otomatis mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran (BPK RI, 2023). Masih terdapat sejumlah catatan terkait pelaksanaan program kegiatan yang tidak mencapai target *output*, serta realisasi belanja yang tidak optimal. Selain itu, adanya ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta potensi pemborosan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, namun hal ini belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Kasus lain yang relevan adalah ketidaksesuaian realisasi belanja daerah dengan rencana anggaran tahunan yang menyebabkan terjadinya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang lumayan tinggi antara tahun 2022 dan 2023. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Secara teoritis, efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin agar dapat mencapai hasil tertentu, sedangkan efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks laporan keuangan, efisiensi berkaitan dengan sejauh mana anggaran digunakan secara optimal tanpa pemborosan, sedangkan efektivitas mengacu pada keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan tujuan strategis.

Penelitian terdahulu oleh Nugroho dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa meskipun suatu pemerintah daerah mendapatkan opini WTP, belum tentu pengelolaan keuangannya telah dilakukan secara efisien dan efektif. Penelitian oleh Sari dan Utami (2022) di Kabupaten Gresik juga mengungkapkan bahwa rendahnya efektivitas program sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah. Beberapa penelitian terdahulu

memberikan gambaran lebih mendalam mengenai kondisi ini. Penelitian oleh Koromath (2020) berdasarkan dari hasil analisis, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari adalah sebesar 92,50% yang artinya tingkat efisiensi di Manokwari masih kurang. Adapun, rata-rata dari tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari adalah sebesar 89,32% yang artinya cukup efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kenaikan dalam komponen belanja tidak langsung seperti belanja pegawai dan belanja hibah dan bantuan sosial pada sekitar tahun 2015-2016.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman, Zaskasyi dan Feri (2022) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2020 tergolong baik dengan rata-rata 3,37%. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap juga menunjukkan sangat efektif dengan rata rata sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah 106,35 %. Diperlukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan keuangan secara digital supaya di masa mendatang supaya bisa diketahui kondisi keuangan secara langsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif adalah indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah yang menuntut akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Belum adanya kajian komprehensif yang mengaitkan hasil laporan keuangan Kabupaten Sidoarjo dengan indikator efisiensi dan efektivitas selama tiga tahun terakhir, maka dapat disimpulkan penelitian ini memiliki tujuan agar bisa menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan laporan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data LKPD dan dokumen perencanaan anggaran daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis efisiensi serta efektivitas pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data keuangan selama tiga tahun anggaran (2022–2024). Analisis kuantitatif dilakukan dengan perhitungan rasio dan indikator keuangan yang relevan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada teori efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah:

1. Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*, semakin besar nilai *output* dibandingkan dengan nilai *input* maka semakin tinggi juga tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2018).

Rasio Efisiensi =

$$\frac{\text{Realisasi}}{\left(\frac{\text{Belanja}}{\text{Realisasi pendapatan}} \right)} \times 100\%$$

2. Efektivitas Keuangan Daerah

Diukur melalui pencapaian target kinerja *output* program/kegiatan dalam APBD. Indikator yang digunakan meliputi realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan target, serta pencapaian program prioritas daerah. Menurut Mardiasmo (2018) efektivitas merupakan ukuran dari berhasil tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi atau program dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan berhasil memenuhi tujuan yang diharapkan. Pengukuran tingkat efektivitas dilihat dari sisi antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan (Mardiasmo, 2018). Dengan formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

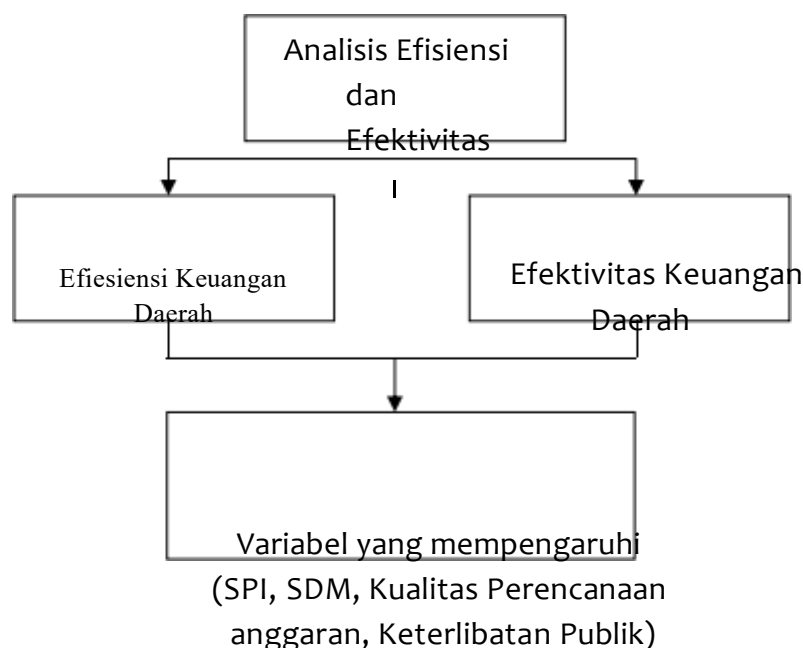
$$\text{Rasio Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \right) \times 100\%$$

3. Variabel yang Mempengaruhi

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi efisiensi dan efektivitas antara lain: sistem pengendalian internal, kapasitas SDM aparatur, kualitas perencanaan anggaran, serta keterlibatan publik dalam penyusunan dan evaluasi anggaran.

Kerangka ini akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data LKPD serta data pendukung lain dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah kerangka konseptual pada karya ilmiah ini :

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



4. Kriteria Penilaian :

Berikut kriteria penilaian kinerja keuangan baik penilaian efisiensi ataupun efektivitas :

Kinerja Keuangan	Presentase	Kriteria
Efisiensi	>100%	Tidak Efisien
	90%-100%	Kurang Efisien
	80%-90%	Cukup
	60%-80%	Efisien
	<60%	Sangat Efisien
Efektivitas	100%	Sangat Efektif
	90%-100%	Efektif
	80%-90%	Cukup Efektif
	60%-80%	Kurang Efektif
	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690 Tahun 1994

HASIL PENELITIAN

a) Hasil Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Efisiensi dianalisis berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran belanja dan anggaran yang direncanakan. Berikut adalah data rasio efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo:

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2022	4.849.911.746.143,62	4.504.849.594.847,19	107,66
2023	3.314.422.277.242	3.951.508.502.915,52	83,88
2024	5.246.635.536.155,47	5.328.676.574.288,81	98,46

b) Hasil Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektivitas diukur melalui realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan target yang direncanakan, serta capaian program prioritas. Berikut data rasio efektivitas:

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2022	4.452.199.210.00	4.504.849.594.847,19	101,18
2023	4.874.347.180.048	3.951.508.502.915,52	81,07
2024	5.086.022.233.649	5.328.676.574.288,81	104,77

c) Pembahasan Hasil Analisis Efisiensi dan Efektivitas

1. Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Tahun 2022 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang kurang baik atau tidak efisien yaitu sebesar 107,66% hal ini dikarenakan pemerintah daerah membelanjakan melebihi pendapatan yang diterima, yang bisa menyebabkan defisit anggaran jika tidak ditutup oleh pembiayaan yang memadai. Tahun 2023 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan cukup efisien yaitu sebesar 83,88% hal ini menunjukkan adanya perbaikan. Sedangkan di Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan kurang efisien yaitu sebesar 98,46%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini mencerminkan kelemahan dalam perencanaan anggaran dan kontrol pengeluaran. Pemerintah daerah seharusnya menyusun anggaran dengan pendekatan yang realistis dan memperketat pengawasan terhadap belanja agar tidak melebihi pendapatan. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan signifikan, namun kondisi tersebut tidak bertahan hingga 2024, yang artinya belum ada sistem pengelolaan yang benar-benar stabil. Efisiensi keuangan daerah tidak hanya soal “hemat”, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya. Efisiensi yang tidak stabil menunjukkan bahwa daerah masih menghadapi tantangan dalam disiplin fiskal dan pengelolaan proyek.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa efisiensi anggaran merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan mampu menghasilkan output maksimal. Pemerintah daerah yang efisien harus mampu mengoptimalkan belanja dengan pendapatan yang tersedia tanpa mengalami pemborosan. Nugroho dan Lestari (2021) menemukan bahwa ketidakefisienan anggaran sering kali berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan proyek akibat proses lelang yang tidak tepat waktu, serta perubahan kebijakan di tengah tahun anggaran.

2. Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Efektivitas tertinggi dicapai pada tahun 2024, dengan realisasi pendapatan sebesar 104,77% dari target. Hal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pendapatannya. Capaian positif juga terjadi di tahun 2022 (101,18%). Namun pada tahun 2023, efektivitas pendapatan menurun drastis menjadi hanya 81,07%, yang mengindikasikan bahwa target pendapatan tidak tercapai. Hal ini dapat disebabkan oleh asumsi target yang terlalu tinggi, atau adanya gangguan dalam mekanisme pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari transfer yang diberikan pemerintah pusat.

Efektivitas yang baik seharusnya konsisten dari tahun ke tahun. Fluktuasi besar seperti yang terjadi di tahun 2023 menandakan perlunya pembenahan dalam sistem perencanaan pendapatan, termasuk melalui digitalisasi, pemutakhiran data wajib pajak, dan evaluasi atas potensi-potensi pendapatan yang selama ini kurang tergarap maksimal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Penetapan target pendapatan harus berbasis pada analisis potensi yang *real*, bukan hanya berdasarkan keinginan untuk menaikkan target secara administratif. Bila target terlalu tinggi, tidak tercapai pun tidak mengejutkan dan ini justru menurunkan kredibilitas fiskal pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas anggaran merupakan suatu tolak ukur dari keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ada. Apabila pendapatan daerah yang realisasinya mendekati atau melebihi target menunjukkan efektivitas yang baik. Sari dan Utami (2022) juga menyatakan bahwa efektivitas PAD sangat dipengaruhi oleh strategi pemungutan pajak, pemutakhiran basis data wajib pajak, dan digitalisasi sistem pajak daerah. Penurunan efektivitas pada tahun 2023 menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi tersebut.

3. Analisis Komparatif dan Faktor Pendorong

Dari sisi tren, efisiensi pengeluaran cenderung stabil, sedangkan efektivitas pendapatan menunjukkan sedikit penurunan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh:

- Kualitas perencanaan anggaran yang lebih baik dari tahun ke tahun.
- Optimalisasi potensi pajak daerah, seperti dari sektor pajak bumi dan pajak bangunan, BPHTB, dan pajak restoran.
- Kapasitas kelembagaan Badan Keuangan Daerah dalam merancang strategi penerimaan dan pengendalian pengeluaran.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut, dibutuhkan:

- Penguatan sistem pengendalian internal.
- Evaluasi program berbasis *output*.
- Inovasi dalam digitalisasi sistem keuangan dan layanan publik.

Tahun 2022 dan 2024 menunjukkan performa yang stabil, namun tahun 2023 terjadi perubahan signifikan yang menunjukkan perlu adanya perbaikan manajemen fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa analisis komparatif sudah cukup tajam, terutama dalam mengidentifikasi faktor internal seperti kualitas perencanaan anggaran, kapasitas kelembagaan, dan upaya digitalisasi. Namun, terdapat faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional atau kebijakan pusat juga sangat perlu untuk dipertimbangkan, karena bisa sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam keuangan daerah.

Tahun 2023 sebagai perubahan data yang besar menegaskan pentingnya manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi dinamika yang cepat dengan sistem yang adaptif dan berbasis data. Hal ini didukung oleh temuan Nugroho dan Lestari (2021), serta Sari dan Utami (2022) yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan optimalisasi sistem pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo bervariasi selama periode 2022 sampai dengan 2024. Tahun 2022 terlihat bahwa pengelolaan keuangan sangat tidak efisien dibandingkan dengan tahun 2023 dalam kategori cukup efisien dan tahun 2024 kategori kurang efisien. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo secara umum berada dalam kategori efektif sepanjang tahun 2022 hingga 2024.

B. Saran

Atas dasar hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan anggaran yang realistis dan berbasis kinerja.
2. Optimalisasi PAD perlu dilakukan dengan pendekatan digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Perlu penguatan pengendalian internal untuk menghindari *inefisiensi* anggaran, khususnya pada tahap pelaksanaan.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, 2019. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Perusahaan Kencana, Jakarta.
- BPK RI. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dan 2023. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Koromath, Johannes Paulus. "Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari." *Lensa Ekonomi* 14.02 (2020): 13-23.
- Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi, M. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, R., & Lestari, I. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 115–127.
- Rahman, Amni Zarkasyi, and Feri Lintang Saputra. "Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap." *Humanika* 22.2 (2022): 117-126.
- Sari, D., & Utami, L. (2022). Evaluasi Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 33–45.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.